

TAJUK RENCANA

Bijak dalam Melihat Study Tour

DENGAN pelbagai dalih, beberapa daerah tiba-tiba membuat larangan sekolah melakukan study tour dan tur perpisahan. Di antara yang sudah melakukan pelarangan ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Kuningan, Pangandaran, Bogor, Cirebon, Depok, Cimahi, Tangerang Selatan, Jawa Tengah dan Sumatra Utara. Kecuali Jawa Tengah yang sudah melakukan pelarangan sejak 2020, ke-10 daerah itu melakukan pelarangan sebagai imbas kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok.

Larangan study tour dan tur perpisahan menuai pro-kontra. Ada pakar pendidikan yang mengatakan bila larangan ini hakikatnya melindungi anak-anak serta tentu saja agar tidak memberatkan orangtua. Meski disebut siswa 'sudah menabung' sejak awal, namun pada saat hari H pelaksanaan, mau tidak mau orangtua tetap harus menyediakan uang saku dan mungkin tambahan biaya. Dan biasanya, tambahan ini tidak sedikit. Padahal tur perpisahan hakikatnya hanya tamasya, piknik.

Ada perbedaan mendasar study tour dan tur perpisahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bila study tour yang dalam Bahasa Indonesia adalah karya wisata bermakna perjalanan ke beberapa lokasi dengan muatan pengetahuan di dalamnya. Misal, study tour SMK Teknik melakukan perjalanan ke kawasan industry dan kemudian pulang dari study tour membuat laporan, meski mungkin tetap ada wisatanya. Sementara tur perpisahan bermakna perjalanan menikmati pemandangan, keindahan alam. Bisa disebut sekadar tamasya, piknik.

Selama ini study tour dan tur perpisahan disamakan, *digebyah-uyah*. Sehingga larangannya menjadi sama : satu untuk semua. Realita ini tentu akan menyulitkan. Karena bagaimanapun bila dilaksanakan dengan benar, study tour adalah sesuatu hal yang diperlukan siswa. Selain karya wisatanya juga mengenal Indonesia yang lebih luas dengan pelbagai jenis wisata : ada wisata religi, wisata heritage, wisata alam, wisata budaya dan lainnya.

Juga kini ada wisata kampus untuk mengenal perguruan tinggi sehingga akan memiliki gambaran kemana mesti melabuhkan pilihan setelah lulus SMA/SMK.

Tanpa mengurangi hormat dan empati pada korban dalam kasus SMK Lingga Kencana, Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan - Perlindungan Anak, Pribudiartha Nur Sitepu menyatakan kecelakaan tidak dapat menjadi alasan melarang study tour. Karena study tour merupakan bagian hak anak mendapatkan pendidikan dengan metode pembelajaran luar kelas. Masih menurutnya, pelarangan yang dilakukan pemerintah daerah dapat menyebabkan anak-anak tidak dapat menikmati haknya mendapatkan pembelajaran di luar kelas melalui rekreasi yang edukatif. (KR,18/5).

Banyak pelajaran bisa dipetik dari peristiwa ini. Juga pelajaran Tragedi Paiton 8 Oktober 2003 yang menimpa siswa SMK Yapemda 1 Sleman dan mengakibatkan korban tewas 54 orang. Atau 7 Juli 2007 yang menimpa pelajar SMP Islam Ar Ridho dan menewaskan 16 orang. Jika dirunut, kecelakaan yang dialami anak-anak menurut Pribudiartha adalah buah 'kelalaian' orang dewasa. Mulai dari ketidakhati-hatian memilih perusahaan penyewaan bus, perusahaan bus yang lalai tidak melakukan kewajiban pemeriksaan berkala untuk armadanya, sopir bus yang tidak melakukan pemeriksaan ulang kelayakan bus sebelum melakukan perjalanan dan lainnya. Menjadi pertanyaan, jika demikian, mengapa kemudian study tournya yang dilarang?

Perlu bijak dalam melihat study tour. Mengusulkan membawa anak wisata di kotanya, tentu sangat bijak. Tentu agar anak mengenal lingkungan terdekat lebih dulu. Apalagi seperti DIY yang memiliki sangat banyak destinasi wisata. Tentu belum semua anak pernah mengunjungi. Namun yang sudah lebih dewasa tentu ingin mengenal yang lebih luas. Karena Indonesia sangat luas dansangat indah. Kita tentu tidak ingin membuat anak-anak *bak katak dalam tempurung*. □f

Semangat Kebangkitan Nasional

TriyanaYohanes

dunia dengan pendapatan per kapita sekitar USD 30.300 dan angka kemiskinan menuju sebesar 0%. Target ini tentu harus dicapai dengan kerja yang sangat keras mengingat pada saat akhir RPJPN 2005 ñ 2025 saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih berada pada angka sekitar

harus selalu digalakkan dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semangat untuk bangkit dan bekerja keras tersebut harus juga didukung dengan peningkatan kualitas di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, pendidikan yang berkualitas dan sebagainya. Bangsa Indonesia juga dituntut untuk berusaha dan bekerja keras menghilangkan segala aspek buruk yang dapat merintangangi realisasi visi Indonesia Emas, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, birokrasi yang mahal dan rumit, ketidakadilan sosial, masuknya nilai-nilai dan ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini peringatan Harkitnas ditandai dengan selebsainya pelaksanaan pesta demokrasi yang berupa pilihan presiden dan pilihan legislatif. Perbedaan pilihan menyebabkan timbulnya potensi perpecahan di antara elemen bangsa Indonesia, yang bila tidak disikapi dengan bijak bisa mengganggu upaya mewujudkan visi Indonesia Emas dan mengganggu semangat persatuan bangsa Indonesia. Karena itu kita harus arif meletakkan semangat persatuan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok, sehingga perbedaan pilihan dalam pemilihan umum tidak mengganggu upaya merealisasikan visi Indonesia Emas dan kelangsungan NKRI. □f

**) Dr Triyana Yohanes SH
MHum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*



KR-JOKO SANTOSO

USD 5.300 (Bahlih Lahadalia, dikutip www.antara.news.com, 18 Maret 2024). Sedang angka kemiskinan Indonesia berdasar data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencapai angka 25,9 juta orang atau 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia (www.cnbcindonesia.com, 2023).

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tentu bukan hal yang mudah, apalagi mengingat sudah lebih dari 50 tahun sejak zaman Orde Baru, Indonesia telah melaksanakan program pembangunan nasional, namun posisi Indonesia sampai sekarang masih merupakan negara sedang berkembang. Karena itu semangat untuk bangkit dan bekerja keras berlandaskan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan semboyan 'Bhineka Tunggal Ika'

Kebangkitan (kembali) Kata-kata

Sigit Sugito

SATU dasawarsa ini sebuah 'perubahan' tengah berlangsung. Bukan 'perubahan' politik praktis, tetapi suatu 'perubahan' sosial budaya, yang di dalamnya termuat 'perubahan' akibat revolusi di bidang informasi dan komunikasi. Pertama, bekerjanya wahana komunikasi baru, sebagai buah dari teknologi, telah membentuk modal komunikasi yang tidak dikenal sebelumnya. Banjir informasi, telah mendorong suatu interaksi yang masif, di mana komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisah. Adanya grup-grup percakapan, misalnya WA Grup, telah memungkinkan komunikasi ke banyak pihak, dalam waktu bersamaan. Ketika pesan dikirim ke grup, maka respons akan datang dari banyak arah.

Mungkin jarang disadari, proses tersebut telah membawa potensi pada suatu implikasi yang luas: (1) pesan menyebar, yang tidak lagi dapat dengan mudah diidentifikasi sumber utamanya; dan (2) informasi yang demikian deras, membuat ketepatan (akurasi) dan makna, makin tidak penting. Hal inilah yang mungkin ikut bertanggungjawab atas merosotnya makna kata.

Kedua, politik yang makin praktis pragmatis. Para politisi tidak tertarik untuk membuat narasi dan mengirim pesan yang mendalam. Baliho, spanduk dan media lain, menjadi pengganti 'diri' yang menjumpai warga. Atas kebutuhan 'kampanye', pesan yang kompleks disederhanakan menjadi 'tagline'. Di sisi lain, persaingan yang dibuat lebih praktis, yakni pertarungan kekuatan modal. Akhirnya, di kalangan warga, yang bekerja bukan lagi kata, melainkan angka-angka. Plesetan NPWP, dari Nomor Pajak Wajib Pajak, menjadi Nomor Piro Wani Piro, mungkin bisa menjadi contoh penjelas.

Ketika politik mengurangi kompleksitas isu ke dalam narasi yang sangat sederhana untuk tujuan pragmatisme dan popularitas para politisi, jalan bagi pendangkalan makna kata makin terbuka. Penyederhanaan masalah kompleks menjadi narasi yang mudah dicerna, detail penting dan nuansa dari masalah tersebut sering terabaikan atau hilang. Kata-ka-

ta yang digunakan dalam narasi tersebut menjadi kurang kaya secara informasi dan kurang mampu menggambarkan realitas yang sebenarnya.

Dominasi narasi sederhana yang diulang-ulang, membuat suara-suara alternatif atau analisis yang lebih mendalam sering dimarginalkan atau dianggap tidak relevan. Ini mengurangi ruang bagi kata-kata dan ide-ide yang mampu menantang 'status quo' atau menawarkan solusi yang lebih beragam dan inklusif. Akibatnya, diskursus publik menjadi terpolarisasi dan terbatas, dengan kata-kata yang tidak lagi mampu menjembatani perbedaan pendapat atau merangsang pemikiran kritis di antara masyarakat.

Kebangkitan

Dalam batas tertentu, kita bisa mengatakan bahwa peristiwa di awal abad XX lalu, yakni peristiwa yang kini kita sebut sebagai kebangkitan nasional, barangkali merupakan kebangkitan kata. Mengapa? Karena jika ditelusuri sejarah kolonial, sebenarnya sangat lekat kaitannya dengan sejarah marjinalisasi aksara atau kata. Politik etis, yang walaupun dapat dikatakan sebagai langkah mengembalikan kata, tetapi dapat dilihat sebagai saksi dari kinerja kolonialisme dalam menghancurkan bangunan kebudayaan yang berbasis kata.

Jika pandangan tersebut dapat diterima, maka tidak berlebihan bila peristiwa kemerdekaan, sangat erat kaitannya dengan gerak kebangkitan kata. Hal ini pula yang mungkin dapat menjelaskan bagaimana kata 'merdeka atau mati' mampu memberi pengaruh yang sangat kuat dan menggerakkan. Peristiwa 10 November 1945, menjadi momen penting yang dapat menjadi saksi bagaimana spirit perlawanan menumbuh pada kata 'merdeka

atau mati'.

Dengan itu semua, kita ingin mengatakan bahwa keadaan rakyat dan bangsa memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan 'kata-kata'. Pendangkalan terencana dan sistematis, tidak saja membuat kata kehilangan makna, dan lumpuh, tetapi juga membuat bangsa kehilangan senjata utamanya menghadapi segala perilaku yang melawan keadilan dan kemanusiaan. Pada titik inilah kita memandang penting suatu kesadaran baru, yakni kesadaran untuk melahirkan upaya bersama membentuk apa yang disebut sebagai 'kebangkitan kata'.

Dalam konteks Yogya, kebangkitan kata mungkin dapat dirujuk pada kurun awal 70an, yakni ketika komunitas penyair, sastrawan dan seniman, bergerak 'menggelar' kata dan membentuk makna. Malioboro barangkali lebih tepat disebut sebagai 'ladang kata-kata', tempat di mana kata timbul dan memberi dampak kepada Indonesia. Kita bisa mengerti jika dalam lagu Yogyakarta, karya KLa Project, memuat frasa 'penuh selaksa makna'. Apakah kata masih akan berjaya, atau makin terpuruk digantikan oleh aspal, semen dan uang? □f

**) Sigit Sugito, Ketua Institut KA-
HADE.*

Pojok KR

Regenerasi pecinta - pembatik kurang berkembang

-- 'PR' besar mempertahankan penghargaan UNESCO

Kekerasan terhadap perempuan kian memprihatinkan

-- Perlu lebih dilantangkan antikekerasan pada perempuan

KPK ajak sineas tularkan nilai antikorupsi lewat film

-- Pemainnya harus benar-benar antikorupsi

Berak

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPERS/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Ir Adjati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Inam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Effing Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Wifay Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijnarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Keping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan : Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.